



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 telah mendapat persetujuan bersama DPRD pada tanggal 25 Juli 2024 dan telah dilakukan evaluasi oleh Menteri Dalam Negeri sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1-3280 Tahun 2024 tanggal 5 Agustus 2024 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023;

- c. bahwa Gubernur bersama DPRD telah melaksanakan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2023;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2023;
 - c. Neraca per 31 Desember 2023;
 - d. Laporan Operasional per 31 Desember 2023;
 - e. Laporan Arus Kas per 31 Desember 2023;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2023; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2023.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah per 31 Desember 2023.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.	4.624.897.387.195,26	
b. Belanja	Rp.	4.460.910.047.257,77	-
<i>Surplus / defisit</i>	<i>Rp.</i>	<i>163.987.339.937,49</i>	
c. Pembiayaan	:		
⇒ Penerimaan	Rp.	222.002.984.475,45	
⇒ Pengeluaran	Rp.	264.779.266.206,00	-
<i>Pembiayaan Netto</i>	<i>Rp.</i>	<i>(42.776.281.730,55)</i>	

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

(1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah (Rp291.288.298.674,76) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan	Rp.	4.916.185.685.870,00
b. Realisasi	Rp.	4.624.897.387.195,26
<i>Selisih lebih / (kurang)</i>	<i>Rp.</i>	<i>(291.288.298.674,76)</i>

(2) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah (Rp434.875.419.563,23) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja setelah perubahan	Rp.	4.895.785.466.821,00
b. Realisasi	Rp.	4.460.910.047.257,77
<i>Selisih lebih / (kurang)</i>	<i>Rp.</i>	<i>(434.875.419.563,23)</i>

(3) Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp143.587.120.888,49 dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/ defisit setelah perubahan	Rp.	20.400.219.049,00
b. Realisasi	Rp.	163.987.339.937,49
<i>Selisih lebih / (kurang)</i>	<i>Rp.</i>	<i>143.587.120.888,49</i>

(4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah (Rp35.999.359.928,55) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp.	258.002.344.404,00
b. Realisasi	Rp.	222.002.984.475,45
<i>Selisih lebih / (kurang)</i>	<i>Rp.</i>	<i>(35.999.359.928,55)</i>

(5) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah (Rp13.623.297.247,00) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp.	278.402.563.453,00
b. Realisasi	Rp.	264.779.266.206,90
<i>Selisih lebih / (kurang)</i>	<i>Rp.</i>	<i>(13.623.297.247,00)</i>

- (6) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah (Rp22.376.062.681,55) dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|--|-----|---------------------|
| a. Anggaran Pembiayaan Netto setelah perubahan | Rp. | (20.400.219.049,00) |
| b. Realisasi | Rp. | (42.776.281.730,55) |
| Selisih lebih / (kurang) | Rp. | (22.376.062.681,55) |

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b sebagai berikut :

- | | | |
|--|-----|--------------------|
| a. Saldo Anggaran Lebih Awal | Rp. | 83.034.698.805,15 |
| b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan | Rp. | 83.195.862.278,15 |
| c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) | Rp. | 121.211.058.206,94 |
| e. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya | Rp. | 161.163.473,00 |
| f. Saldo Anggaran Lebih Akhir | Rp. | 121.211.058.206,94 |

Pasal 5

Laporan Operasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d sebagai berikut :

- | | | |
|--|-----|----------------------|
| (1) Pendapatan – LO | Rp. | 4.764.700.558.041,38 |
| a. Pendapatan Asli Daerah – LO | Rp. | 1.360.941.625.291,02 |
| b. Pendapatan Transfer – LO | Rp. | 3.196.880.853.342,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah- LO | Rp. | 206.878.079.408,36 |
| (2) Beban – LO | Rp. | 4.560.507.577.297,67 |
| a. Beban Operasi – LO | Rp. | 3.250.891.066.716,48 |
| b. Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO | Rp. | 735.177.854.677,67 |
| c. Beban Transfer – LO | Rp. | 569.956.867.556,00 |
| d. Beban Lain-Lain - LO | Rp. | 4.481.788.347,52 |
| (3) Surplus/Defisit dari Operasi | Rp. | 204.192.980.743,71 |
| (4) Surplus/Defisit dari Non Operasi | Rp. | (151.840.746,01) |
| a. Surplus Non Operasional | Rp. | 1.799.815.151,30 |
| b. Defisit Non Operasional | Rp. | 1.951.655.897,31 |
| (5) Surplus/Defisit LO | Rp. | 204.041.139.997,70 |

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f sebagai berikut :

- | | | |
|---|-----|-----------------------|
| a. Ekuitas Awal | Rp. | 10.396.432.365.578,90 |
| b. Surplus/Defisit – LO | Rp. | 204.041.139.997,70 |
| c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar | Rp. | (536.472.163.049,99) |
| - Dampak Perubahan Nilai Persediaan | Rp. | 1.715.810.905,30 |

- Dampak Perubahan Kas	Rp.	161.163.473,00
- Dampak Perubahan Atas Aset Tetap	Rp.	69.226.201.403,46
- Dampak Perubahan Atas Penyusutan	Rp.	(510.070.080.899,81)
- Dampak Perubahan Atas Investasi	Rp.	(15.335.219.729,61)
- Dampak Perubahan Atas Utang	Rp.	(41.633.994.686,83)
- Dampak Perubahan Atas Kapitalisasi	Rp.	
- Dampak Perubahan Atas Penyisihan	Rp.	(796.309.159,94)
- Dampak Perubahan Atas Aset Lainnya	Rp.	17.446.110.461,54
- Dampak Perubahan Atas Piutang	Rp.	(54.369.027.416,20)
- Dampak Perubahan Atas Dana Cadangan	Rp.	(320.446.456,50)
- Dampak Perubahan Atas Penyusutan Properti Investasi	Rp.	(2.496.370.944,40)
d. Jumlah Ekuitas Akhir	Rp.	10.064.001.342.526,64

Pasal 7

Neraca, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp.	11.259.418.487.077,72
b. Jumlah Kewajiban	Rp.	1.195.417.144.551,08
c. Jumlah Ekuitas	Rp.	10.064.001.342.526,64

Pasal 8

Laporan Arus Kas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

a. Saldo Kas awal per 1 Januari Tahun 2023	Rp.	83.034.698.805,15
b. Arus Kas bersih dari aktivitas operasi	Rp.	783.515.088.070,99
c. Arus Kas bersih dari aktivitas investasi	Rp.	(720.720.625.936,20)
d. Arus Kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp.	(24.618.102.733,00)
e. Arus Kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp.	201.458.557,00
f. Saldo Kas akhir per 31 Desember Tahun 2023	Rp.	121.412.516.763,94

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

- Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2023 dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah terdiri atas:
- Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah
- Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah

Pasal 11

- (1) Lampiran Laporan Keuangan berupa Laporan Kinerja BUMD/Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) tercantum dalam Laporan Keuangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran Laporan Keuangan berupa Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) tercantum dalam Laporan Keuangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 13 Agustus 2024

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



AYODHIA G. L. KALAKE

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 13 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



KOSMAS D. LANA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024
NOMOR 002

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR :
(2-155/2024)

PARAF HIERARKI PENGUNDANGAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	R
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	k
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	✓

PARAF HIERARKI PENETAPAN	
SEKRETARIS DAERAH	✓
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	R
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	k

LAMPIRAN LI PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 2 TAHUN 2024
TANGGAL : 13 AGUSTUS 2024

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)			
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	
		Rp	Rp	Rp	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	6
	PENDAPATAN	4.916.185.685.870,00	4.624.897.387.195,26	(291.288.298.674,74)	94,07
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	148.465.000.000,00	145.612.367.004,39	(2.852.632.995,61)	98,08
1 01	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	800.000.000,00	634.666.000,00	(165.334.000,00)	79,33
1 01 0 00 0 00 01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	800.000.000,00	634.666.000,00	(165.334.000,00)	79,33
1 02	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	144.000.000.000,00	143.216.748.496,62	(783.251.503,38)	99,46
1 02 0 00 0 00 01	RSUD Prof Dr W Z Johannes Kupang	136.000.000.000,00	133.631.334.006,62	(2.368.665.993,38)	98,26
1 02 0 00 0 00 02	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.000.000.000,00	9.585.414.490,00	1.585.414.490,00	119,82
1 03	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.500.000.000,00	1.694.452.507,77	(1.805.547.492,23)	48,41
1 03 1 04 2 10 01	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	3.500.000.000,00	1.694.452.507,77	(1.805.547.492,23)	48,41
1 05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	-	-	-	-
1 05 0 00 0 00 01	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-
1 05 0 00 0 00 02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-
1 06	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	165.000.000,00	66.500.000,00	(98.500.000,00)	40,30
1 06 0 00 0 00 01	Dinas Sosial	165.000.000,00	66.500.000,00	(98.500.000,00)	40,30
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15.758.872.003,00	3.316.267.289,00	(12.442.604.714,00)	21,04
2 08	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	180.000.000,00	175.200.000,00	(4.800.000,00)	97,33
2 08 2 14 0 00 01	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	180.000.000,00	175.200.000,00	(4.800.000,00)	97,33

AR

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)			
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	
		Rp	Rp	Rp	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	6
2 11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	7.207.000.900,00	1.150.183.776,00	(6.056.817.124,00)	15,96
2 11 3 28 0 00 01	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	7.207.000.900,00	1.150.183.776,00	(6.056.817.124,00)	15,96
2 13	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	75.000.000,00	62.700.000,00	(12.300.000,00)	83,60
2 13 2 12 0 00 01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	75.000.000,00	62.700.000,00	(12.300.000,00)	83,60
2 15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	7.249.871.103,00	1.160.704.013,00	(6.089.167.090,00)	16,01
2 15 0 00 0 00 01	Dinas Perhubungan	7.249.871.103,00	1.160.704.013,00	(6.089.167.090,00)	16,01
2 16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	60.000.000,00	51.000.000,00	(9.000.000,00)	85,00
2 16 2 20 2 21 01	Dinas Komunikasi dan Informatika	60.000.000,00	51.000.000,00	(9.000.000,00)	85,00
2 17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	350.000.000,00	192.950.000,00	(157.050.000,00)	55,13
2 17 3 32 0 00 01	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	350.000.000,00	192.950.000,00	(157.050.000,00)	55,13
2 18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	-	-	-	-
2 18 0 00 0 00 01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-
2 19	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	600.000.000,00	507.058.000,00	(92.942.000,00)	84,51
2 19 0 00 0 00 01	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	600.000.000,00	507.058.000,00	(92.942.000,00)	84,51
2 23	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	37.000.000,00	16.471.500,00	(20.528.500,00)	44,52
2 23 2 24 0 00 01	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	37.000.000,00	16.471.500,00	(20.528.500,00)	44,52
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	24.954.599.967,00	15.620.817.793,00	(9.333.782.174,00)	62,60
3 25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	10.000.000.000,00	7.611.509.196,00	(2.388.490.804,00)	76,12
3 25 0 00 0 00 01	Dinas Kelautan dan Perikanan	10.000.000.000,00	7.611.509.196,00	(2.388.490.804,00)	76,12
3 26	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	2.850.599.967,00	469.262.880,00	(2.381.337.087,00)	16,46
3 26 0 00 0 00 01	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2.850.599.967,00	469.262.880,00	(2.381.337.087,00)	16,46
3 27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	11.600.000.000,00	7.456.043.917,00	(4.143.956.083,00)	64,28
3 25 0 00 0 00 01	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	3.100.000.000,00	1.739.422.917,00	(1.360.577.083,00)	56,11

R

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)			
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	
		Rp	Rp	Rp	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	6
3 25 0 00 0 00 02	Dinas Peternakan	8.500.000.000,00	5.716.621.000,00	(2.783.379.000,00)	67,25
3 29	Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-	-
3 29 0 00 0 00 01	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	-	-	-	-
3 31	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	504.000.000,00	84.001.800,00	(419.998.200,00)	16,67
3 31 3 30 2 17 01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	504.000.000,00	84.001.800,00	(419.998.200,00)	16,67
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	484.635.653,00	339.237.581,00	(145.398.072,00)	70,00
4 01	Sekretariat Daerah	484.635.653,00	339.237.581,00	(145.398.072,00)	70,00
4 01 0 00 0 00 01	Sekretariat Daerah	484.635.653,00	339.237.581,00	(145.398.072,00)	70,00
4 02	Sekretariat DPRD	-	-	-	-
4 02 0 00 0 00 01	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-	-	-	-
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	4.726.500.978.247,00	4.459.987.097.527,87	(266.513.880.719,13)	94,36
5 01	Perencanaan	-	-	-	-
5 01 5 05 0 00 01	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-	-	-
5 02	Keuangan	4.702.629.959.995,00	4.446.568.360.683,87	(256.061.599.311,13)	94,55
5 02 0 00 0 00 01	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	1.336.405.983.272,00	1.172.781.683.200,77	(163.624.300.071,23)	87,76
5 02 0 00 0 00 02	Badan Keuangan Daerah	3.366.223.976.723,00	3.273.786.677.483,10	(92.437.299.239,90)	97,25
5 03	Kepegawaian	-	-	-	-
5 03 0 00 0 00 01	Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-	-
5 04	Pendidikan dan Pelatihan	23.751.018.252,00	13.292.486.844,00	(10.458.531.408,00)	55,97
5 04 0 00 0 00 01	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	23.751.018.252,00	13.292.486.844,00	(10.458.531.408,00)	55,97
5 06	Pengelolaan Perbatasan	-	-	-	-
5 06 0 00 0 00 01	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	-	-	-	-
5 07	Pengelolaan Penghubung	120.000.000,00	126.250.000,00	6.250.000,00	105,21
5 07 0 00 0 00 01	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	120.000.000,00	126.250.000,00	6.250.000,00	105,21

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)			
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	
		Rp	Rp	Rp	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	6
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	-	-	-	-
6 01	Inspektorat Daerah	-	-	-	-
6 01 0 00 0 00 01	Inspektorat Daerah	-	-	-	-
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	21.600.000,00	21.600.000,00	-	100,00
8 01	Kesatuan Bangsa dan Politik	21.600.000,00	21.600.000,00	-	100,00
8 01 0 00 0 00 01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	21.600.000,00	21.600.000,00	-	100,00
	BELANJA	4.895.785.466.821,00	4.460.910.047.257,77	(434.875.419.563,23)	91,12
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.997.343.429.186,00	2.735.023.002.840,27	(262.320.426.345,73)	91,25
1 01	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	2.090.539.255.771,00	1.984.621.315.030,90	(105.917.940.740,10)	94,93
1 01 0 00 0 00 01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.090.539.255.771,00	1.984.621.315.030,90	(105.917.940.740,10)	94,93
	BELANJA OPERASI	1.767.620.114.832,00	1.624.529.632.815,90	(143.090.482.016,10)	91,90
	Belanja Pegawai	1.055.436.180.510,00	972.464.185.676,00	(82.971.994.834,00)	92,14
	Belanja Barang dan Jasa	630.834.334.587,00	424.917.194.278,90	(205.917.140.308,10)	67,36
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	81.349.599.735,00	227.148.252.861,00	145.798.653.126,00	279,22
	Belanja Bantuan Sosial		-	-	-
	BELANJA MODAL	322.919.140.939,00	360.091.682.215,00	37.172.541.276,00	111,51
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
1 02	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	577.581.737.626,00	481.240.753.063,37	(96.340.984.562,63)	83,32
1 02 0 00 0 00 01	RSUD Prof Dr W Z Johannes Kupang	371.328.954.752,00	308.211.973.820,37	(63.116.980.931,63)	83,00
	BELANJA OPERASI	294.875.965.169,00	252.628.358.390,37	(42.247.606.778,63)	85,67
	Belanja Pegawai	99.455.796.000,00	92.034.269.860,00	(7.421.526.140,00)	92,54
	Belanja Barang dan Jasa	195.420.169.169,00	160.594.088.530,37	(34.826.080.638,63)	82,18
	Belanja Bunga	-	-	-	-

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)			
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	
		Rp	Rp	Rp	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	6
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	BELANJA MODAL	76.452.989.583,00	55.583.615.430,00	(20.869.374.153,00)	72,70
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
1 02 0 00 0 00 02	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	206.252.782.874,00	173.028.779.243,00	(33.224.003.631,00)	83,89
	BELANJA OPERASI	202.364.018.275,00	170.309.289.194,00	(32.054.729.081,00)	84,16
	Belanja Pegawai	22.029.128.000,00	20.178.037.093,00	(1.851.090.907,00)	91,60
	Belanja Barang dan Jasa	180.334.890.275,00	150.131.252.101,00	(30.203.638.174,00)	83,25
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	BELANJA MODAL	3.888.764.599,00	2.719.490.049,00	(1.169.274.550,00)	69,93
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
1 03	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	233.457.555.317,00	200.553.416.666,00	(32.904.138.651,00)	85,91
1 03 1 04 2 10 01	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	233.457.555.317,00	200.553.416.666,00	(32.904.138.651,00)	85,91
	BELANJA OPERASI	56.925.105.221,00	48.981.252.626,00	(7.943.852.595,00)	86,05
	Belanja Pegawai	25.385.931.036,00	23.180.432.473,00	(2.205.498.563,00)	91,31
	Belanja Barang dan Jasa	30.299.219.685,00	24.700.820.153,00	(5.598.399.532,00)	81,52
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	1.239.954.500,00	1.100.000.000,00	(139.954.500,00)	88,71
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	BELANJA MODAL	176.532.450.096,00	151.572.164.040,00	(24.960.286.056,00)	85,86
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)			
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	
		Rp	Rp	Rp	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	6
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
1 05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	24.077.594.900,00	18.492.213.370,00	(5.585.381.530,00)	76,80
1 05 0 00 0 00 01	Satuan Polisi Pamong Praja	13.708.942.700,00	11.352.634.994,00	(2.356.307.706,00)	82,81
	BELANJA OPERASI	13.708.942.700,00	11.352.634.994,00	(2.356.307.706,00)	82,81
	Belanja Pegawai	10.199.801.000,00	9.184.369.270,00	(1.015.431.730,00)	90,04
	Belanja Barang dan Jasa	3.509.141.700,00	2.168.265.724,00	(1.340.875.976,00)	61,79
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	BELANJA MODAL	-	-	-	-
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
1 05 0 00 0 00 02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.368.652.200,00	7.139.578.376,00	(3.229.073.824,00)	68,86
	BELANJA OPERASI	10.252.130.400,00	7.102.282.376,00	(3.149.848.024,00)	69,28
	Belanja Pegawai	4.831.411.000,00	4.293.488.349,00	(537.922.651,00)	88,87
	Belanja Barang dan Jasa	5.420.719.400,00	2.808.794.027,00	(2.611.925.373,00)	51,82
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	BELANJA MODAL	116.521.800,00	37.296.000,00	(79.225.800,00)	32,01
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
1 06	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	71.687.285.572,00	50.115.304.710,00	(21.571.980.862,00)	69,91
1 06 0 00 0 00 01	Dinas Sosial	71.687.285.572,00	50.115.304.710,00	(21.571.980.862,00)	69,91
	BELANJA OPERASI	70.170.184.952,00	49.429.561.718,00	(20.740.623.234,00)	70,44
	Belanja Pegawai	16.743.920.000,00	15.034.770.588,00	(1.709.149.412,00)	89,79

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)			
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	
		Rp	Rp	Rp	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	6
	Belanja Barang dan Jasa	21.176.264.952,00	17.534.791.130,00	(3.641.473.822,00)	82,80
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	350.000.000,00	350.000.000,00	-	100,00
	Belanja Bantuan Sosial	31.900.000.000,00	16.510.000.000,00	(15.390.000.000,00)	51,76
	BELANJA MODAL	1.517.100.620,00	685.742.992,00	(831.357.628,00)	45,20
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	233.130.977.918,00	199.152.562.022,00	(33.978.415.896,00)	85,43
2 08	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6.892.432.255,00	5.627.308.146,00	(1.265.124.109,00)	81,64
2 08 2 14 0 00 01	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6.892.432.255,00	5.627.308.146,00	(1.265.124.109,00)	81,64
	BELANJA OPERASI	6.826.313.355,00	5.595.686.146,00	(1.230.627.209,00)	81,97
	Belanja Pegawai	4.838.298.999,00	4.096.445.546,00	(741.853.453,00)	84,67
	Belanja Barang dan Jasa	1.988.014.356,00	1.499.240.600,00	(488.773.756,00)	75,41
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	BELANJA MODAL	66.118.900,00	31.622.000,00	(34.496.900,00)	47,83
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2 11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	99.979.559.782,00	87.629.909.646,00	(12.349.650.136,00)	87,65
2 11 3 28 0 00 01	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	99.979.559.782,00	87.629.909.646,00	(12.349.650.136,00)	87,65
	BELANJA OPERASI	99.289.012.382,00	87.615.738.646,00	(11.673.273.736,00)	88,24
	Belanja Pegawai	69.688.381.000,00	64.460.667.517,00	(5.227.713.483,00)	92,50
	Belanja Barang dan Jasa	29.600.631.382,00	23.155.071.129,00	(6.445.560.253,00)	78,22
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)			
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	
		Rp	Rp	Rp	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	6
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	BELANJA MODAL	690.547.400,00	14.171.000,00	(676.376.400,00)	2,05
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2 13	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	9.051.591.780,00	7.401.465.357,00	(1.650.126.423,00)	81,77
2 13 2 12 0 00 01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9.051.591.780,00	7.401.465.357,00	(1.650.126.423,00)	81,77
	BELANJA OPERASI	9.051.591.780,00	7.401.465.357,00	(1.650.126.423,00)	81,77
	Belanja Pegawai	5.477.863.000,00	4.868.022.947,00	(609.840.053,00)	88,87
	Belanja Barang dan Jasa	3.573.728.780,00	2.533.442.410,00	(1.040.286.370,00)	70,89
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	BELANJA MODAL	-	-	-	-
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2 15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	22.077.936.280,00	19.894.358.340,00	(2.183.577.940,00)	90,11
2 15 0 00 0 00 01	Dinas Perhubungan	22.077.936.280,00	19.894.358.340,00	(2.183.577.940,00)	90,11
	BELANJA OPERASI	16.456.666.784,00	15.133.192.841,00	(1.323.473.943,00)	91,96
	Belanja Pegawai	11.560.960.200,00	10.400.472.881,00	(1.160.487.319,00)	89,96
	Belanja Barang dan Jasa	4.895.706.584,00	4.732.719.960,00	(162.986.624,00)	96,67
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	BELANJA MODAL	5.621.269.496,00	4.761.165.499,00	(860.103.997,00)	84,70
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)			
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	
		Rp	Rp	Rp	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	6
2 16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	13.590.100.235,00	12.662.309.049,00	(927.791.186,00)	93,17
2 16 2 20 2 21 01	Dinas Komunikasi dan Informatika	13.590.100.235,00	12.662.309.049,00	(927.791.186,00)	93,17
	BELANJA OPERASI	13.405.383.780,00	12.629.786.049,00	(775.597.731,00)	94,21
	Belanja Pegawai	6.098.418.000,00	5.483.928.114,00	(614.489.886,00)	89,92
	Belanja Barang dan Jasa	6.306.965.780,00	6.145.857.935,00	(161.107.845,00)	97,45
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	100,00
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	BELANJA MODAL	184.716.455,00	32.523.000,00	(152.193.455,00)	17,61
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2 17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	31.422.755.876,00	24.365.608.710,00	(7.057.147.166,00)	77,54
2 17 3 32 0 00 01	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	31.422.755.876,00	24.365.608.710,00	(7.057.147.166,00)	77,54
	BELANJA OPERASI	31.420.532.876,00	24.365.608.710,00	(7.054.924.166,00)	77,55
	Belanja Pegawai	15.946.809.000,00	14.568.600.678,00	(1.378.208.322,00)	91,36
	Belanja Barang dan Jasa	9.205.223.876,00	6.588.508.032,00	(2.616.715.844,00)	71,57
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	56.000.000,00	56.000.000,00	-	100,00
	Belanja Bantuan Sosial	6.212.500.000,00	3.152.500.000,00	(3.060.000.000,00)	50,74
	BELANJA MODAL	2.223.000,00	-	(2.223.000,00)	0,00
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2 18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	7.965.030.448,00	7.088.720.956,00	(876.309.492,00)	89,00
2 18 0 00 0 00 01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.965.030.448,00	7.088.720.956,00	(876.309.492,00)	89,00
	BELANJA OPERASI	7.961.798.448,00	7.085.809.245,00	(875.989.203,00)	89,00
	Belanja Pegawai	5.740.562.000,00	5.170.659.872,00	(569.902.128,00)	90,07

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)			
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	
		Rp	Rp	Rp	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	6
	Belanja Barang dan Jasa	2.221.236.448,00	1.915.149.373,00	(306.087.075,00)	86,22
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	BELANJA MODAL	3.232.000,00	2.911.711,00	(320.289,00)	90,09
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2 19	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	26.986.859.014,00	24.152.969.644,00	(2.833.889.370,00)	89,50
2 19 0 00 0 00 01	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	26.986.859.014,00	24.152.969.644,00	(2.833.889.370,00)	89,50
	BELANJA OPERASI	26.986.859.014,00	24.152.969.644,00	(2.833.889.370,00)	89,50
	Belanja Pegawai	8.574.276.000,00	7.686.515.384,00	(887.760.616,00)	89,65
	Belanja Barang dan Jasa	10.224.480.014,00	8.798.351.260,00	(1.426.128.754,00)	86,05
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	7.048.103.000,00	7.048.103.000,00	-	100,00
	Belanja Bantuan Sosial	1.140.000.000,00	620.000.000,00	(520.000.000,00)	54,39
	BELANJA MODAL	-	-	-	-
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2 23	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	15.164.712.248,00	10.329.912.174,00	(4.834.800.074,00)	68,12
2 23 2 24 0 00 01	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	15.164.712.248,00	10.329.912.174,00	(4.834.800.074,00)	68,12
	BELANJA OPERASI	14.473.839.958,00	9.692.807.384,00	(4.781.032.574,00)	66,97
	Belanja Pegawai	11.361.000.000,00	6.931.117.393,00	(4.429.882.607,00)	61,01
	Belanja Barang dan Jasa	3.112.839.958,00	2.761.689.991,00	(351.149.967,00)	88,72
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)			
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	
		Rp	Rp	Rp	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	6
	BELANJA MODAL	690.872.290,00	637.104.790,00	(53.767.500,00)	92,22
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	281.739.407.975,00	253.744.527.070,00	(27.994.880.905,00)	90,06
3 25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	51.579.537.247,00	47.152.417.645,00	(4.427.119.602,00)	91,42
3 25 0 00 0 00 01	Dinas Kelautan dan Perikanan	51.579.537.247,00	47.152.417.645,00	(4.427.119.602,00)	91,42
	BELANJA OPERASI	21.973.949.847,00	18.766.228.485,00	(3.207.721.362,00)	85,40
	Belanja Pegawai	12.535.190.000,00	11.143.584.106,00	(1.391.605.894,00)	88,90
	Belanja Barang dan Jasa	9.438.759.847,00	7.622.644.379,00	(1.816.115.468,00)	80,76
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	BELANJA MODAL	29.605.587.400,00	28.386.189.160,00	(1.219.398.240,00)	95,88
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
3 26	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	10.521.011.760,00	8.322.815.279,00	(2.198.196.481,00)	79,11
3 26 0 00 0 00 01	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	10.521.011.760,00	8.322.815.279,00	(2.198.196.481,00)	79,11
	BELANJA OPERASI	10.521.011.760,00	8.322.815.279,00	(2.198.196.481,00)	79,11
	Belanja Pegawai	6.812.377.000,00	6.316.361.852,00	(496.015.148,00)	92,72
	Belanja Barang dan Jasa	3.708.634.760,00	2.006.453.427,00	(1.702.181.333,00)	54,10
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	BELANJA MODAL	-	-	-	-
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)			
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	
		Rp	Rp	Rp	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	6
3 27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	103.693.494.676,00	90.545.694.513,00	(13.147.800.163,00)	87,32
3 25 0 00 0 00 01	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	74.720.980.332,00	65.374.470.056,00	(9.346.510.276,00)	87,49
	BELANJA OPERASI	58.210.386.982,00	51.017.026.312,00	(7.193.360.670,00)	87,64
	Belanja Pegawai	31.822.417.000,00	29.094.624.769,00	(2.727.792.231,00)	91,43
	Belanja Barang dan Jasa	26.387.969.982,00	21.922.401.543,00	(4.465.568.439,00)	83,08
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	BELANJA MODAL	16.510.593.350,00	14.357.443.744,00	(2.153.149.606,00)	86,96
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
3 25 0 00 0 00 02	Dinas Peternakan	28.972.514.344,00	25.171.224.457,00	(3.801.289.887,00)	86,88
	BELANJA OPERASI	28.596.454.010,00	24.822.753.123,00	(3.773.700.887,00)	86,80
	Belanja Pegawai	15.061.805.000,00	13.752.416.750,00	(1.309.388.250,00)	91,31
	Belanja Barang dan Jasa	13.534.649.010,00	11.070.336.373,00	(2.464.312.637,00)	81,79
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	BELANJA MODAL	376.060.334,00	348.471.334,00	(27.589.000,00)	92,66
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
3 29	Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	103.759.651.444,00	98.660.648.111,00	(5.099.003.333,00)	95,09
3 29 0 00 0 00 01	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	103.759.651.444,00	98.660.648.111,00	(5.099.003.333,00)	95,09
	BELANJA OPERASI	103.627.578.444,00	98.660.648.111,00	(4.966.930.333,00)	95,21
	Belanja Pegawai	9.986.390.000,00	8.952.046.374,00	(1.034.343.626,00)	89,64
	Belanja Barang dan Jasa	93.641.188.444,00	89.708.601.737,00	(3.932.586.707,00)	95,80
	Belanja Bunga	-	-	-	-

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)			
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	
		Rp	Rp	Rp	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	6
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	BELANJA MODAL	132.073.000,00	-	(132.073.000,00)	0,00
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
3 31	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	12.185.712.848,00	9.062.951.522,00	(3.122.761.326,00)	74,37
3 31 3 30 2 17 01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	12.185.712.848,00	9.062.951.522,00	(3.122.761.326,00)	74,37
	BELANJA OPERASI	12.078.872.848,00	9.062.951.522,00	(3.015.921.326,00)	75,03
	Belanja Pegawai	6.412.601.000,00	5.492.446.820,00	(920.154.180,00)	85,65
	Belanja Barang dan Jasa	4.666.271.848,00	2.935.504.702,00	(1.730.767.146,00)	62,91
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	1.000.000.000,00	635.000.000,00	(365.000.000,00)	63,50
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	BELANJA MODAL	106.840.000,00	-	(106.840.000,00)	0,00
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	263.405.464.895,00	229.533.106.719,50	(33.872.358.175,50)	87,14
4 01	Sekretariat Daerah	116.039.508.855,00	97.337.360.330,50	(18.702.148.524,50)	83,88
4 01 0 00 0 00 01	Sekretariat Daerah	116.039.508.855,00	97.337.360.330,50	(18.702.148.524,50)	83,88
	BELANJA OPERASI	115.370.668.688,00	96.902.575.822,00	(18.468.092.866,00)	83,99
	Belanja Pegawai	39.850.211.269,00	36.497.372.913,00	(3.352.838.356,00)	91,59
	Belanja Barang dan Jasa	63.220.857.419,00	54.449.934.919,00	(8.770.922.500,00)	86,13
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	3.000.000.000,00	2.692.867.990,00	(307.132.010,00)	89,76
	Belanja Bantuan Sosial	9.299.600.000,00	3.262.400.000,00	(6.037.200.000,00)	35,08
	BELANJA MODAL	668.840.167,00	434.784.508,50	(234.055.658,50)	65,01

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)			
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	
		Rp	Rp	Rp	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	6
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
4 02	Sekretariat DPRD	147.365.956.040,00	132.195.746.389,00	(15.170.209.651,00)	89,71
4 02 0 00 0 00 01	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	147.365.956.040,00	132.195.746.389,00	(15.170.209.651,00)	89,71
	BELANJA OPERASI	147.272.761.040,00	132.102.922.639,00	(15.169.838.401,00)	89,70
	Belanja Pegawai	56.980.303.000,00	52.742.307.545,00	(4.237.995.455,00)	92,56
	Belanja Barang dan Jasa	90.292.458.040,00	79.360.615.094,00	(10.931.842.946,00)	87,89
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	BELANJA MODAL	93.195.000,00	92.823.750,00	(371.250,00)	99,60
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	917.158.757.407,00	881.078.152.414,00	(36.080.604.993,00)	96,07
5 01	Perencanaan	18.586.954.290,00	14.029.735.446,00	(4.557.218.844,00)	75,48
5 01 5 05 0 00 01	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	18.586.954.290,00	14.029.735.446,00	(4.557.218.844,00)	75,48
	BELANJA OPERASI	18.586.954.290,00	14.029.735.446,00	(4.557.218.844,00)	75,48
	Belanja Pegawai	9.319.956.000,00	8.737.980.849,00	(581.975.151,00)	93,76
	Belanja Barang dan Jasa	9.266.998.290,00	5.291.754.597,00	(3.975.243.693,00)	57,10
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	BELANJA MODAL	-	-	-	-
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)			
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	
		Rp	Rp	Rp	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	6
5 02	Keuangan	846.306.137.897,00	822.252.581.668,00	(24.053.556.229,00)	97,16
5 02 0 00 0 00 01	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	85.317.757.937,00	74.921.430.177,00	(10.396.327.760,00)	87,81
	BELANJA OPERASI	84.067.086.857,00	73.833.122.924,00	(10.233.963.933,00)	87,83
	Belanja Pegawai	44.635.590.945,00	39.120.053.087,00	(5.515.537.858,00)	87,64
	Belanja Barang dan Jasa	39.431.495.912,00	34.713.069.837,00	(4.718.426.075,00)	88,03
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	BELANJA MODAL	1.250.671.080,00	1.088.307.253,00	(162.363.827,00)	87,02
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
5 02 0 00 0 00 02	Badan Keuangan Daerah	760.988.379.960,00	747.331.151.491,00	(13.657.228.469,00)	98,21
	BELANJA OPERASI	99.579.478.083,00	92.991.088.232,00	(6.588.389.851,00)	93,38
	Belanja Pegawai	6.591.802.000,00	5.982.415.183,00	(609.386.817,00)	90,76
	Belanja Barang dan Jasa	29.613.464.695,00	24.124.626.663,00	(5.488.838.032,00)	81,47
	Belanja Bunga	63.374.211.388,00	62.884.046.386,00	(490.165.002,00)	99,23
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	BELANJA MODAL	115.368.000,00	115.361.190,00	(6.810,00)	99,99
	BELANJA TIDAK TERDUGA	11.055.939.527,00	707.344.000,00	(10.348.595.527,00)	6,40
	BELANJA TRANSFER	650.237.594.350,00	653.517.358.069,00	3.279.763.719,00	100,50
5 03	Kepegawaian	12.209.004.680,00	10.829.748.522,00	(1.379.256.158,00)	88,70
5 03 0 00 0 00 01	Badan Kepegawaian Daerah	12.209.004.680,00	10.829.748.522,00	(1.379.256.158,00)	88,70
	BELANJA OPERASI	12.112.212.880,00	10.733.774.502,00	(1.378.438.378,00)	88,62
	Belanja Pegawai	7.904.074.000,00	7.023.189.707,00	(880.884.293,00)	88,86
	Belanja Barang dan Jasa	4.208.138.880,00	3.710.584.795,00	(497.554.085,00)	88,18
	Belanja Bunga	-	-	-	-

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)			
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	
		Rp	Rp	Rp	%
		3	4	5 = (4-3)	6
1	2				
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	BELANJA MODAL	96.791.800,00	95.974.020,00	(817.780,00)	99,16
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
5 04	Pendidikan dan Pelatihan	26.207.008.870,00	21.529.402.310,00	(4.677.606.560,00)	82,15
5 04 0 00 0 00 01	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	26.207.008.870,00	21.529.402.310,00	(4.677.606.560,00)	82,15
	BELANJA OPERASI	25.896.513.870,00	21.332.793.310,00	(4.563.720.560,00)	82,38
	Belanja Pegawai	9.226.068.547,00	7.958.526.537,00	(1.267.542.010,00)	86,26
	Belanja Barang dan Jasa	16.670.445.323,00	13.374.266.773,00	(3.296.178.550,00)	80,23
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	BELANJA MODAL	310.495.000,00	196.609.000,00	(113.886.000,00)	63,32
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
5 06	Pengelolaan Perbatasan	5.896.135.120,00	5.041.963.134,00	(854.171.986,00)	85,51
5 06 0 00 0 00 01	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	5.896.135.120,00	5.041.963.134,00	(854.171.986,00)	85,51
	BELANJA OPERASI	5.870.103.120,00	5.015.989.134,00	(854.113.986,00)	85,45
	Belanja Pegawai	4.198.988.000,00	3.638.675.119,00	(560.312.881,00)	86,66
	Belanja Barang dan Jasa	1.671.115.120,00	1.377.314.015,00	(293.801.105,00)	82,42
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	BELANJA MODAL	26.032.000,00	25.974.000,00	(58.000,00)	99,78
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)			
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	
		Rp	Rp	Rp	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	6
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
5 07	Pengelolaan Penghubung	7.953.516.550,00	7.394.721.334,00	(558.795.216,00)	92,97
5 07 0 00 0 00 01	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	7.953.516.550,00	7.394.721.334,00	(558.795.216,00)	92,97
	BELANJA OPERASI	7.938.126.550,00	7.379.421.334,00	(558.705.216,00)	92,96
	Belanja Pegawai	3.059.564.000,00	2.765.276.157,00	(294.287.843,00)	90,38
	Belanja Barang dan Jasa	4.878.562.550,00	4.614.145.177,00	(264.417.373,00)	94,58
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	BELANJA MODAL	15.390.000,00	15.300.000,00	(90.000,00)	99,42
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	18.655.098.580,00	14.198.502.163,00	(4.456.596.417,00)	76,11
6 01	Inspektorat Daerah	18.655.098.580,00	14.198.502.163,00	(4.456.596.417,00)	76,11
6 01 0 00 0 00 01	Inspektorat Daerah	18.655.098.580,00	14.198.502.163,00	(4.456.596.417,00)	76,11
	BELANJA OPERASI	18.600.359.580,00	14.183.205.163,00	(4.417.154.417,00)	76,25
	Belanja Pegawai	9.313.331.000,00	8.608.586.881,00	(704.744.119,00)	92,43
	Belanja Barang dan Jasa	9.287.028.580,00	5.574.618.282,00	(3.712.410.298,00)	60,03
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	BELANJA MODAL	54.739.000,00	15.297.000,00	(39.442.000,00)	27,95
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)			
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah / Berkurang	
		Rp	Rp	Rp	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	6
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	184.352.330.860,00	148.180.194.029,00	(36.172.136.831,00)	80,38
8 01	Kesatuan Bangsa dan Politik	184.352.330.860,00	148.180.194.029,00	(36.172.136.831,00)	80,38
8 01 0 00 0 00 01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	184.352.330.860,00	148.180.194.029,00	(36.172.136.831,00)	80,38
	BELANJA OPERASI	184.336.432.860,00	148.180.194.029,00	(36.156.238.831,00)	80,39
	Belanja Pegawai	4.310.712.000,00	3.744.148.369,00	(566.563.631,00)	86,86
	Belanja Barang dan Jasa	6.040.986.460,00	5.020.424.860,00	(1.020.561.600,00)	83,11
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	173.984.734.400,00	139.415.620.800,00	(34.569.113.600,00)	80,13
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	BELANJA MODAL	15.898.000,00	-	(15.898.000,00)	0,00
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
	(SURPLUS/DEFISIT)	20.400.219.049,00	163.987.339.937,49	143.587.120.888,49	803,85

KUPANG, 31 DESEMBER 2023

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



AYODHIA G. L. KALAKE

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
Plt. KEPALA BIRO HUKUM	

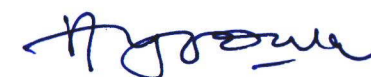
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
2	3	4	5	6
PENDAPATAN DAERAH	4.916.185.685.870,00	4.624.897.387.195,26	94,07	4.426.473.562.255,23
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.712.892.170.870,00	1.427.035.167.291,26	83,31	1.363.737.981.851,23
Pajak Daerah	1.311.609.133.150,00	1.154.822.144.629,04	88,05	1.095.501.455.474,33
Retribusi Daerah	65.433.703.905,00	44.202.047.251,00	67,55	61.613.862.027,05
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	60.645.290.853,00	60.645.290.853,00	100,00	37.175.980.457,00
Lain-lain PAD yang Sah	275.204.042.962,00	167.365.684.558,22	60,82	169.446.683.892,85
PENDAPATAN TRANSFER	3.201.541.919.000,00	3.194.678.968.455,00	99,79	3.053.836.755.861,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.201.541.919.000,00	3.194.678.968.455,00	99,79	3.039.880.514.861,00
Dana Bagi Hasil	53.785.499.000,00	56.371.680.113,00	104,81	65.358.865.115,00
Dana Alokasi Umum	1.857.019.095.000,00	1.876.608.978.000,00	101,05	1.730.933.330.000,00
Dana Alokasi Khusus	1.290.737.325.000,00	1.261.698.310.342,00	97,75	1.243.588.319.746,00
Dana Insentif Daerah	-	-	-	13.956.241.000,00
Dana Insentif Daerah			-	13.956.241.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.751.596.000,00	3.183.251.449,00	181,73	8.898.824.543,00
Pendapatan Hibah	1.751.596.000,00	3.183.251.449,00	181,73	8.898.824.543,00
BELANJA DAERAH	4.895.785.466.821,00	4.460.910.047.257,77	91,12	4.816.652.654.356,79
BELANJA OPERASI	3.596.427.411.635,00	3.185.343.321.503,27	88,57	3.051.851.164.202,45
Belanja Pegawai	1.651.390.116.506,00	1.511.605.996.659,00	91,54	1.421.874.102.462,37
Belanja Barang dan Jasa	1.564.082.592.106,00	1.207.862.533.807,27	77,22	1.208.109.064.095,84
Belanja Bunga	63.374.211.388,00	62.884.046.386,00	99,23	54.539.281.319,24
Belanja Hibah	269.028.391.635,00	379.445.844.651,00	141,04	335.277.916.325,00
Belanja Bantuan Sosial	48.552.100.000,00	23.544.900.000,00	48,49	32.050.800.000,00
BELANJA MODAL	638.064.521.309,00	621.342.023.685,50	97,38	1.216.802.446.597,34
Belanja Modal Tanah			-	1.050.294.656,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	170.694.164.778,00	193.621.780.165,50	113,43	144.284.448.880,00

Uraian	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	285.490.047.285,00	248.250.770.111,00	86,96	141.655.437.253,34
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	178.807.578.196,00	155.271.232.138,00	86,84	909.704.835.562,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.072.731.050,00	24.198.241.271,00	787,52	20.107.430.246,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	11.055.939.527,00	707.344.000,00	6,40	7.228.173.756,00
Belanja Tidak Terduga	11.055.939.527,00	707.344.000,00	6,40	7.228.173.756,00
BELANJA TRANSFER	650.237.594.350,00	653.517.358.069,00	100,50	540.770.869.801,00
Belanja Bagi Hasil	649.537.594.350,00	653.517.358.069,00	100,61	527.502.869.801,00
Belanja Bantuan Keuangan	700.000.000,00		0,00	13.268.000.000,00
SURPLUS/(DEFISIT)	20.400.219.049,00	163.987.339.937,49	803,85	(390.179.092.101,56)
PEMBIAYAAN DAERAH	(20.400.219.049,00)	(42.776.281.730,55)	209,69	473.213.790.906,71
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	258.002.344.404,00	222.002.984.475,45	86,05	796.167.336.796,61
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran TahunSebelumnya	83.034.698.805,00	83.195.862.278,15	100,19	62.544.957.626,61
Pencairan Dana Cadangan	170.807.913.600,00	136.488.800.000,00		-
Penerimaan Pinjaman Daerah			-	730.098.883.256,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	4.159.731.999,00	2.318.322.197,30	55,73	3.523.495.914,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	278.402.563.453,00	264.779.266.206,00	95,11	322.953.545.889,90
Pembentukan Dana Cadangan	240.000.000.000,00	240.000.000.000,00	100,00	100.000.000.000,00
Penyertaan Modal Daerah			-	14.000.000.000,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	38.402.563.453,00	24.779.266.206,00	64,53	208.953.545.889,90
PEMBIAYAAN NETTO	(20.400.219.049,00)	(42.776.281.730,55)	209,69	473.213.790.906,71
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	121.211.058.206,94	-	83.034.698.805,15

KUPANG, 31 DESEMBER 2023

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



AYODHIA G. L. KALAKE

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
Plt. KEPALA BIRO HUKUM	

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
ORGANISASI : 1.01.0.00.0.00.01. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	800.000.000,00	634.666.000,00	(165.334.000,00)	79,33	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	800.000.000,00	634.666.000,00	(165.334.000,00)	79,33	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.02.	Retribusi Daerah	800.000.000,00	634.666.000,00	(165.334.000,00)	79,33	
	JUMLAH PENDAPATAN	800.000.000,00	634.666.000,00	(165.334.000,00)	79,33	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5.	BELANJA DAERAH	2.090.539.255.771,00	1.984.621.315.030,90	105.917.940.740,10	94,93	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.	X.JXX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.042.655.125.385,00	979.547.706.256,00	63.107.419.129,00	93,94	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	17.545.700,00	2.282.700,00	15.263.000,00	13,01	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	4.711.200,00	1.910.700,00	2.800.500,00	40,55	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.711.200,00	1.910.700,00	2.800.500,00	40,55	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.01.02.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA- SKPD	4.050.000,00	372.000,00	3.678.000,00	9,18	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.050.000,00	372.000,00	3.678.000,00	9,18	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.01.03.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	3.360.000,00	-	3.360.000,00	-	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.360.000,00	-	3.360.000,00	-	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.01.04.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	3.050.000,00	-	3.050.000,00	-	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.01.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.050.000,00	-	3.050.000,00	-	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	2.374.500,00	-	2.374.500,00	-	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.01.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.374.500,00	-	2.374.500,00	-	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.034.363.784.305,00	972.025.775.676,00	62.338.008.629,00	93,97	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.034.312.691.605,00	971.977.145.676,00	62.335.545.929,00	93,97	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	1.034.312.691.605,00	971.977.145.676,00	62.335.545.929,00	93,97	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.02.03.	PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	51.092.700,00	48.630.000,00	2.462.700,00	95,17	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1.01.	Belanja Pegawai	48.960.000,00	48.630.000,00	330.000,00	99,32	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.132.700,00	-	2.132.700,00	-	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	12.976.300,00	3.040.000,00	9.936.300,00	23,42	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02.	PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	5.199.000,00	-	5.199.000,00	-	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.199.000,00	-	5.199.000,00	-	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.03.04.	PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	3.297.300,00	-	3.297.300,00	-	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.03.04.5.1.01.	Belanja Pegawai	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.03.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	297.300,00	-	297.300,00	-	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.03.06.	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	4.480.000,00	3.040.000,00	1.440.000,00	67,85	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.03.06.5.1.01.	Belanja Pegawai	4.080.000,00	3.040.000,00	1.040.000,00	74,50	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.03.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	-	400.000,00	-	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	17.803.700,00	3.500.000,00	14.303.700,00	19,65	

 SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.05.01.	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DISIPLIN PEGAWAI	15.600.800,00	3.500.000,00	12.100.800,00	22,43	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.05.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	10.470.000,00	3.500.000,00	6.970.000,00	33,42	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.05.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.130.800,00	-	5.130.800,00	-	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.05.03.	PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	2.202.900,00	-	2.202.900,00	-	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.202.900,00	-	2.202.900,00	-	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	394.806.680,00	126.520.940,00	268.285.740,00	32,04	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	31.242.200,00	6.338.000,00	24.904.200,00	20,28	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	31.242.200,00	6.338.000,00	24.904.200,00	20,28	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	35.179.900,00	7.002.700,00	28.177.200,00	19,90	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	35.179.900,00	7.002.700,00	28.177.200,00	19,90	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	35.295.000,00	27.394.000,00	7.901.000,00	77,61	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	35.295.000,00	27.394.000,00	7.901.000,00	77,61	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	17.892.660,00	1.200.000,00	16.692.660,00	6,70	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	17.892.660,00	1.200.000,00	16.692.660,00	6,70	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	2.400.000,00	800.000,00	1.600.000,00	33,33	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	800.000,00	1.600.000,00	33,33	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.06.07.	PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	64.140.000,00	33.088.500,00	31.051.500,00	51,58	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.06.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	64.140.000,00	33.088.500,00	31.051.500,00	51,58	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.06.08.	FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	31.907.700,00	2.673.000,00	29.234.700,00	8,37	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	31.907.700,00	2.673.000,00	29.234.700,00	8,37	

 SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	176.749.220,00	48.024.740,00	128.724.480,00	27,17	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	176.749.220,00	48.024.740,00	128.724.480,00	27,17	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	152.646.000,00	67.044.000,00	85.602.000,00	43,92	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.07.05.	PENGADAAN MEBEL	60.933.000,00	-	60.933.000,00	-	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.07.05.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.933.000,00	-	60.933.000,00	-	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.07.06.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	91.713.000,00	67.044.000,00	24.669.000,00	73,10	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.07.06.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	91.713.000,00	67.044.000,00	24.669.000,00	73,10	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.417.567.100,00	7.214.131.820,00	203.435.280,00	97,25	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.08.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	9.836.000,00	2.010.000,00	7.826.000,00	20,43	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.836.000,00	2.010.000,00	7.826.000,00	20,43	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	360.347.220,00	360.347.220,00	-	100,00	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	360.347.220,00	360.347.220,00	-	100,00	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	7.047.383.880,00	6.851.774.600,00	195.609.280,00	97,22	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1.01.	Belanja Pegawai	124.140.000,00	88.560.000,00	35.580.000,00	71,33	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.922.559.880,00	6.763.214.600,00	159.345.280,00	97,69	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	684.000,00	-	684.000,00	-	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	277.995.600,00	105.411.120,00	172.584.480,00	37,91	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	161.623.600,00	93.862.620,00	67.760.980,00	58,07	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	161.623.600,00	93.862.620,00	67.760.980,00	58,07	

 SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		Dasar Mukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.09.06.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	101.372.000,00	11.548.500,00	89.823.500,00	11,39	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	56.000.000,00	4.722.000,00	51.278.000,00	8,43	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.372.000,00	6.826.500,00	38.545.500,00	15,04	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.09.09.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	15.000.000,00	-	15.000.000,00	-	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	-	15.000.000,00	-	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.013.259.388.911,00	976.095.838.707,90	37.163.550.203,10	96,33	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.01.	PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS	488.983.280.609,00	534.985.963.300,90	(46.002.682.691,90)	109,40	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.01.02.	PENAMBAHAN RUANG KELAS BARU	163.127.711.680,00	155.503.997.982,00	7.623.713.698,00	95,32	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.716.349.680,00	3.117.020.179,00	1.599.329.501,00	66,08	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1.05.	Belanja Hibah	12.437.232.000,00	12.285.360.740,00	151.871.260,00	98,77	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.025.000.000,00	23.178.662.000,00	846.338.000,00	96,47	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	121.949.130.000,00	116.922.955.063,00	5.026.174.937,00	95,87	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.01.14.	PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH	1.479.041.246,00	1.473.954.788,00	5.086.458,00	99,65	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.01.14.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	966.285.246,00	961.356.788,00	4.928.458,00	99,48	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.01.14.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	512.756.000,00	512.598.000,00	158.000,00	99,96	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.01.50.	PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS	36.654.048.000,00	30.812.751.840,00	5.841.296.160,00	84,06	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.01.50.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	36.654.048.000,00	30.812.751.840,00	5.841.296.160,00	84,06	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.01.51.	PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS	15.913.507.220,00	15.544.261.164,00	369.246.056,00	97,67	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.01.51.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	15.850.180.220,00	15.481.141.014,00	369.039.206,00	97,67	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.01.51.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	63.327.000,00	63.120.150,00	206.850,00	99,67	

 SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.01.53.	PENGLOLAAN DANA BOS SEKOLAH MENENGAH ATAS	271.808.972.463,00	331.650.997.526,90	(59.842.025.063,90)	122,01	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.01.53.5.1.01.	Belanja Pegawai	10.864.228.118,00	7.200.000,00	10.857.028.118,00	0,06	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.01.53.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	243.689.682.020,00	191.804.988.659,90	51.884.693.360,10	78,70	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.01.53.5.1.05.	Belanja Hibah	12.611.103.749,00	97.257.986.281,00	(84.646.882.532,00)	771,20	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.01.53.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.685.644.826,00	24.112.938.406,00	(20.427.293.580,00)	654,23	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.01.53.5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	958.313.750,00	18.467.884.180,00	(17.509.570.430,00)	1.927,12	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.02.	PENGLOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	467.212.281.487,00	387.560.962.083,00	79.651.319.404,00	82,95	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.02.10.	PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH	192.169.262.220,00	182.440.887.634,00	9.728.374.586,00	94,93	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.02.10.5.1.01.	Belanja Pegawai	405.000.000,00	336.110.000,00	68.890.000,00	82,99	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.02.10.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	14.586.478.020,00	10.164.716.683,00	4.421.761.337,00	69,68	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.02.10.5.1.05.	Belanja Hibah	38.399.796.000,00	38.120.181.215,00	279.614.785,00	99,27	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.02.10.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	66.395.941.200,00	63.999.876.889,00	2.396.064.311,00	96,39	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.02.10.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	72.382.047.000,00	69.820.002.847,00	2.562.044.153,00	96,46	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.02.42.	PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	20.722.918.080,00	17.109.760.800,00	3.613.157.280,00	82,56	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.02.42.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	20.722.918.080,00	17.109.760.800,00	3.613.157.280,00	82,56	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.02.43.	PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	11.109.855.340,00	9.247.164.750,00	1.862.690.590,00	83,23	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.02.43.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	11.040.030.340,00	9.177.573.000,00	1.862.457.340,00	83,12	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.02.43.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	69.825.000,00	69.591.750,00	233.250,00	99,66	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.02.46.	PENGLOLAAN DANA BOS SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	243.210.245.847,00	178.763.148.899,00	64.447.096.948,00	73,50	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.02.46.5.1.01.	Belanja Pegawai	6.825.845.787,00	-	6.825.845.787,00	-	

 SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.02.46.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	220.209.266.761,00	87.230.526.350,00	132.978.740.411,00	39,61	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.02.46.5.1.05.	Belanja Hibah	13.952.002.986,00	75.599.544.625,00	(61.647.541.639,00)	541,85	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.02.46.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.071.780.313,00	11.720.273.362,00	(9.648.493.049,00)	565,71	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.02.46.5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	151.350.000,00	4.212.804.562,00	(4.061.454.562,00)	2.783,48	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.03.	PENGLOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS	57.063.826.815,00	53.548.913.324,00	3.514.913.491,00	93,84	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.03.08.	PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH	19.546.200.000,00	18.534.918.973,00	1.111.281.027,00	94,34	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.03.08.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	657.267.650,00	543.929.610,00	113.338.040,00	82,75	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.03.08.5.1.05.	Belanja Hibah	620.380.000,00	620.380.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.03.08.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.021.110.000,00	997.540.720,00	23.569.280,00	97,69	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.03.08.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	17.272.442.350,00	16.298.068.943,00	974.373.407,00	94,35	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.03.08.5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	75.000.000,00	74.999.700,00	300,00	99,99	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.03.48.	PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA	125.000.000,00	102.751.000,00	22.249.000,00	82,20	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.03.48.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	102.751.000,00	22.249.000,00	82,20	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.03.49.	PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS	6.453.486.720,00	5.670.712.800,00	782.773.920,00	87,87	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.03.49.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.453.486.720,00	5.670.712.800,00	782.773.920,00	87,87	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.03.50.	PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS	598.743.600,00	597.293.875,00	1.449.725,00	99,75	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.03.50.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	534.110.000,00	532.660.275,00	1.449.725,00	99,72	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.03.50.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.633.600,00	64.633.600,00	-	100,00	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.03.51.	PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH PENDIDIKAN KHUSUS	16.926.791.395,00	15.317.982.775,00	1.608.808.619,00	90,49	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.03.51.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	16.430.682.895,00	14.822.674.946,00	1.608.007.949,00	90,21	

 SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.03.51.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	496.108.500,00	495.307.830,00	800.670,00	99,83	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.03.52.	PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH PENDIDIKAN KHUSUS	13.313.605.100,00	13.325.253.900,00	(11.648.800,00)	100,08	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.03.52.5.1.01.	Belanja Pegawai	2.837.765.000,00	-	2.837.765.000,00	-	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.03.52.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.833.057.800,00	9.001.360.649,00	(3.168.302.849,00)	154,31	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.03.52.5.1.05.	Belanja Hibah	3.329.085.000,00	3.264.800.000,00	64.285.000,00	98,06	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.03.52.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	839.181.500,00	924.494.241,00	(85.312.741,00)	110,16	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.03.52.5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	474.515.800,00	134.599.010,00	339.916.790,00	28,36	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.03.	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	6.470.259.935,00	4.439.039.245,00	2.031.220.690,00	68,60	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.03.1.01.	PENETAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN MENENGAH	6.470.259.935,00	4.439.039.245,00	2.031.220.690,00	68,60	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.03.1.01.01.	PENYUSUNAN KOMPETENSI DASAR MUATAN LOKAL PENDIDIKAN MENENGAH	6.470.259.935,00	4.439.039.245,00	2.031.220.690,00	68,60	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.353.166.035,00	4.322.372.695,00	2.030.793.340,00	68,03	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	67.093.900,00	66.833.100,00	260.800,00	99,61	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	50.000.000,00	49.833.450,00	166.550,00	99,66	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.06.	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	239.462.780,00	191.488.890,00	47.973.890,00	79,96	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.06.1.01.	PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PERLINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA YANG PENUTURANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	239.462.780,00	191.488.890,00	47.973.890,00	79,96	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.06.1.01.07.	PENYUSUNAN MODUL DAN BAHAN AJAR BAHASA DAERAH KEWENANGAN PROVINSI	239.462.780,00	191.488.890,00	47.973.890,00	79,96	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.06.1.01.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	239.462.780,00	191.488.890,00	47.973.890,00	79,96	
2.22.1.01.0.00.0.00.01.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	4.951.284.600,00	4.560.572.027,00	390.712.573,00	92,10	

 SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.22.1.01.0.00.0.00.01.02.1.01.	PENGLOLAAN KEBUDAYAAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	1.942.642.000,00	1.800.936.861,00	141.705.139,00	92,70	
2.22.1.01.0.00.0.00.01.02.1.01.02.	PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA, LEMBAGA, DAN PRANATA KEBUDAYAAN	1.942.642.000,00	1.800.936.861,00	141.705.139,00	92,70	
2.22.1.01.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.942.642.000,00	1.800.936.861,00	141.705.139,00	92,70	
2.22.1.01.0.00.0.00.01.02.1.02.	PELESTARIAN KESENIAN TRADISIONAL YANG MASYARAKAT PELAKUNYA LINTAS KABUPATEN/KOTA DALAM DAERAH PROVINSI	3.008.642.600,00	2.759.635.166,00	249.007.434,00	91,72	
2.22.1.01.0.00.0.00.01.02.1.02.02.	PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA, LEMBAGA, DAN PRANATA TRADISIONAL	3.008.642.600,00	2.759.635.166,00	249.007.434,00	91,72	
2.22.1.01.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.008.642.600,00	2.759.635.166,00	249.007.434,00	91,72	
2.22.1.01.0.00.0.00.01.03.	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	7.473.821.460,00	6.909.886.733,00	563.934.727,00	92,45	
2.22.1.01.0.00.0.00.01.03.1.01.	PEMBINAAN KESENIAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.473.821.460,00	6.909.886.733,00	563.934.727,00	92,45	
2.22.1.01.0.00.0.00.01.03.1.01.01.	PENINGKATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESENIAN TRADISIONAL	782.000.000,00	758.403.960,00	23.596.040,00	96,98	
2.22.1.01.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	782.000.000,00	758.403.960,00	23.596.040,00	96,98	
2.22.1.01.0.00.0.00.01.03.1.01.02.	STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA KESENIAN TRADISIONAL SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAN TUNTUTAN	2.000.000.000,00	1.940.495.287,00	59.504.713,00	97,02	
2.22.1.01.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000.000,00	1.940.495.287,00	59.504.713,00	97,02	
2.22.1.01.0.00.0.00.01.03.1.01.03.	PENINGKATAN KAPASITAS TATA KELOLA LEMBAGA KESENIAN TRADISIONAL	4.691.821.460,00	4.210.987.486,00	480.833.974,00	89,75	
2.22.1.01.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.730.645.260,00	3.306.781.174,00	423.864.086,00	88,63	
2.22.1.01.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	301.291.200,00	295.578.182,00	5.713.018,00	98,10	
2.22.1.01.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	570.000.000,00	519.207.600,00	50.792.400,00	91,08	
2.22.1.01.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	89.885.000,00	89.420.530,00	464.470,00	99,48	

 SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.22.1.01.0.00.0.00.01.04.	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	1.143.732.660,00	919.848.680,00	223.883.980,00	80,42	
2.22.1.01.0.00.0.00.01.04.1.01.	PEMBINAAN SEJARAH LOKAL PROVINSI	1.143.732.660,00	919.848.680,00	223.883.980,00	80,42	
2.22.1.01.0.00.0.00.01.04.1.01.04.	FASILITASI PENINGKATAN PENULISAN SEJARAH LOKAL	1.143.732.660,00	919.848.680,00	223.883.980,00	80,42	
2.22.1.01.0.00.0.00.01.04.1.01.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.143.732.660,00	919.848.680,00	223.883.980,00	80,42	
2.22.1.01.0.00.0.00.01.05.	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.379.680.040,00	2.270.910.564,00	108.769.476,00	95,42	
2.22.1.01.0.00.0.00.01.05.1.02.	PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT PROVINSI	2.379.680.040,00	2.270.910.564,00	108.769.476,00	95,42	
2.22.1.01.0.00.0.00.01.05.1.02.01.	PELINDUNGAN CAGAR BUDAYA	2.379.680.040,00	2.270.910.564,00	108.769.476,00	95,42	
2.22.1.01.0.00.0.00.01.05.1.02.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.379.680.040,00	2.270.910.564,00	108.769.476,00	95,42	
2.22.1.01.0.00.0.00.01.06.	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	11.966.500.000,00	9.686.023.928,00	2.280.476.072,00	80,94	
2.22.1.01.0.00.0.00.01.06.1.01.	PENGELOLAAN MUSEUM PROVINSI	11.966.500.000,00	9.686.023.928,00	2.280.476.072,00	80,94	
2.22.1.01.0.00.0.00.01.06.1.01.01.	PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, DAN PEMANFAATAN KOLEKSI SECARA TERPADU	750.000.000,00	737.826.900,00	12.173.100,00	98,37	
2.22.1.01.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	691.850.000,00	679.676.900,00	12.173.100,00	98,24	
2.22.1.01.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	58.150.000,00	58.150.000,00	-	100,00	
2.22.1.01.0.00.0.00.01.06.1.01.03.	PENINGKATAN PELAYANAN DAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP MUSEUM	1.500.000.000,00	1.457.237.900,00	42.762.100,00	97,14	
2.22.1.01.0.00.0.00.01.06.1.01.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.470.588.000,00	1.434.665.900,00	35.922.100,00	97,55	
2.22.1.01.0.00.0.00.01.06.1.01.03.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.572.000,00	22.572.000,00	-	100,00	
2.22.1.01.0.00.0.00.01.06.1.01.03.5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.840.000,00	-	6.840.000,00	-	
2.22.1.01.0.00.0.00.01.06.1.01.04.	PENYEDIAAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA MUSEUM	9.716.500.000,00	7.490.959.128,00	2.225.540.872,00	77,09	
2.22.1.01.0.00.0.00.01.06.1.01.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	670.000.000,00	645.093.528,00	24.906.472,00	96,28	
2.22.1.01.0.00.0.00.01.06.1.01.04.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.046.500.000,00	6.845.865.600,00	2.200.634.400,00	75,67	

 SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH BELANJA	2.090.539.255.771,00	1.984.621.315.030,90	105.917.940.740,10	94,93	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(2.089.739.255.771,00)	(1.983.986.649.030,90)	(106.083.274.740,10)	94,93	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(2.089.739.255.771,00)	(1.983.986.649.030,90)	(106.083.274.740,10)	94,93	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00		

URUSAN PEMERINTAHAN : 8.01. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 ORGANISASI : 8.01.0.00.0.00.01. - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
8.01.8.01.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	21.600.000,00	21.600.000,00	-	100,00	
8.01.8.01.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	21.600.000,00	21.600.000,00	-	100,00	
8.01.8.01.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.02.	Retribusi Daerah	21.600.000,00	21.600.000,00	-	100,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	21.600.000,00	21.600.000,00	-	100,00	
8.01.8.01.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5.	BELANJA DAERAH	184.352.330.860,00	148.180.194.029,00	36.172.136.831,00	80,37	
0.00.8.01.0.00.0.00.01.01.	X.JX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.163.227.500,00	4.389.712.739,00	773.514.761,00	85,01	
0.00.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	233.948.200,00	151.192.000,00	82.756.200,00	64,62	
0.00.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	1.440.400,00	939.400,00	501.000,00	65,21	
0.00.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.05.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.440.400,00	939.400,00	501.000,00	65,21	
0.00.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	226.183.800,00	150.252.600,00	75.931.200,00	66,42	
0.00.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.06.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	226.183.800,00	150.252.600,00	75.931.200,00	66,42	
0.00.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.07.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	6.324.000,00	-	6.324.000,00	-	
0.00.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.07.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.324.000,00	-	6.324.000,00	-	
0.00.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.178.112.000,00	3.613.588.369,00	564.523.631,00	86,48	
0.00.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4.178.112.000,00	3.613.588.369,00	564.523.631,00	86,48	
0.00.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	4.178.112.000,00	3.613.588.369,00	564.523.631,00	86,48	
0.00.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	205.052.060,00	152.112.270,00	52.939.790,00	74,18	
0.00.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	4.273.000,00	4.257.500,00	15.500,00	99,63	
0.00.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.273.000,00	4.257.500,00	15.500,00	99,63	
0.00.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	21.753.600,00	21.744.000,00	9.600,00	99,95	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
0.00.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	21.753.600,00	21.744.000,00	9.600,00	99,95	
0.00.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	900.000,00	520.000,00	380.000,00	57,77	
0.00.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	520.000,00	380.000,00	57,77	
0.00.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.07.	PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	58.516.300,00	46.505.570,00	12.010.730,00	79,47	
0.00.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	58.516.300,00	46.505.570,00	12.010.730,00	79,47	
0.00.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.08.	FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	24.543.000,00	14.582.600,00	9.960.400,00	59,41	
0.00.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	24.543.000,00	14.582.600,00	9.960.400,00	59,41	
0.00.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	95.066.160,00	64.502.600,00	30.563.560,00	67,85	
0.00.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	95.066.160,00	64.502.600,00	30.563.560,00	67,85	
0.00.8.01.0.00.0.00.01.01.1.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	16.496.500,00	-	16.496.500,00	-	
0.00.8.01.0.00.0.00.01.01.1.07.07.	PENGADAAN ASET TETAP LAINNYA	16.496.500,00	-	16.496.500,00	-	
0.00.8.01.0.00.0.00.01.01.1.07.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	598.500,00	-	598.500,00	-	
0.00.8.01.0.00.0.00.01.01.1.07.07.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.898.000,00	-	15.898.000,00	-	
0.00.8.01.0.00.0.00.01.01.1.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	452.453.040,00	403.899.710,00	48.553.330,00	89,26	
0.00.8.01.0.00.0.00.01.01.1.08.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.698.600,00	1.500.000,00	198.600,00	88,30	
0.00.8.01.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.698.600,00	1.500.000,00	198.600,00	88,30	
0.00.8.01.0.00.0.00.01.01.1.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	14.590.000,00	5.129.550,00	9.460.450,00	35,15	
0.00.8.01.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	14.590.000,00	5.129.550,00	9.460.450,00	35,15	
0.00.8.01.0.00.0.00.01.01.1.08.03.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	17.160.000,00	7.800.000,00	9.360.000,00	45,45	
0.00.8.01.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	17.160.000,00	7.800.000,00	9.360.000,00	45,45	
0.00.8.01.0.00.0.00.01.01.1.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	419.004.440,00	389.470.160,00	29.534.280,00	92,95	

 SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
0.00.8.01.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1.01.	Belanja Pegawai	132.600.000,00	130.560.000,00	2.040.000,00	98,46	
0.00.8.01.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	286.404.440,00	258.910.160,00	27.494.280,00	90,40	
0.00.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	77.165.700,00	68.920.390,00	8.245.310,00	89,31	
0.00.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.01.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	40.025.700,00	40.021.500,00	4.200,00	99,98	
0.00.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	40.025.700,00	40.021.500,00	4.200,00	99,98	
0.00.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	37.140.000,00	28.898.890,00	8.241.110,00	77,81	
0.00.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	37.140.000,00	28.898.890,00	8.241.110,00	77,81	
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	2.453.023.640,00	2.132.421.030,00	320.602.610,00	86,93	
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	2.453.023.640,00	2.132.421.030,00	320.602.610,00	86,93	
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.02.	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BHINEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN	2.453.023.640,00	2.132.421.030,00	320.602.610,00	86,93	
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.453.023.640,00	2.132.421.030,00	320.602.610,00	86,93	
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	174.042.905.860,00	139.374.347.300,00	34.668.558.560,00	80,08	
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK	174.042.905.860,00	139.374.347.300,00	34.668.558.560,00	80,08	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.04.	PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH	174.042.905.860,00	139.374.347.300,00	34.668.558.560,00	80,08	
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	308.171.460,00	208.726.500,00	99.444.960,00	67,73	
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.04.5.1.05.	Belanja Hibah	173.734.734.400,00	139.165.620.800,00	34.569.113.600,00	80,10	
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	61.424.000,00	57.416.000,00	4.008.000,00	93,47	
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	61.424.000,00	57.416.000,00	4.008.000,00	93,47	
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.03.	PELAKSANAAN KEBIJAKAN DIBIDANG PENDAFTARAN ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS, EVALUASI DAN MEDIASI SENGKETA ORMAS, PENGAWASAN ORMAS DAN ORMAS ASING DI DAERAH	61.424.000,00	57.416.000,00	4.008.000,00	93,47	
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	61.424.000,00	57.416.000,00	4.008.000,00	93,47	
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	289.012.540,00	258.007.600,00	31.004.940,00	89,27	
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	289.012.540,00	258.007.600,00	31.004.940,00	89,27	
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.01.	PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH	250.000.000,00	250.000.000,00	-	100,00	
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1.05.	Belanja Hibah	250.000.000,00	250.000.000,00	-	100,00	
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.04.	PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH	39.012.540,00	8.007.600,00	31.004.940,00	20,52	
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	39.012.540,00	8.007.600,00	31.004.940,00	20,52	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	2.342.737.320,00	1.968.289.360,00	374.447.960,00	84,01	
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	2.342.737.320,00	1.968.289.360,00	374.447.960,00	84,01	
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.06.	PELAKSANAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH PROVINSI	2.342.737.320,00	1.968.289.360,00	374.447.960,00	84,01	
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.342.737.320,00	1.968.289.360,00	374.447.960,00	84,01	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(184.330.730.860,00)	(148.158.594.029,00)	(36.172.136.831,00)	80,37	
	JUMLAH BELANJA	184.352.330.860,00	148.180.194.029,00	36.172.136.831,00	80,37	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(184.330.730.860,00)	(148.158.594.029,00)	(36.172.136.831,00)	80,37	

KUPANG, 31 DESEMBER 2023

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



AYODHIA G.L. KALAKE

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
Pt. KEPALA BIRO HUKUM	

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Halaman 1 dari 109

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan					Realisasi					Bertambah/ (Berkurang)	
		Jenis Belanja				Jumlah	Jenis Belanja				Jumlah	(Rp)	%
		BELANJA OPERASI	MODAL	TAK TERDUGA	TRANSFER		BELANJA OPERASI	MODAL	TAK TERDUGA	TRANSFER			
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12-7	14
1.01.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.748.800.334.272,00	312.823.902.739,00	0,00	0,00	2.062.624.237.011,00	1.608.813.184.795,90	352.260.888.303,00	0,00	0,00	1.968.274.073.098,90	102.350.183.812,10	4,96
1.01.0.01.01.0.0 0.0.00.01.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.042.456.423.385,00	198.702.000,00	0,00	0,00	1.042.655.125.385,00	979.473.835.756,00	73.870.500,00	0,00	0,00	979.547.706.256,00	63.107.419.129,00	6,05
1.01.0.01.01.0.0 0.0.00.01.01.	X.XXX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.042.456.423.385,00	198.702.000,00	0,00	0,00	1.042.655.125.385,00	979.473.835.756,00	73.870.500,00	0,00	0,00	979.547.706.256,00	63.107.419.129,00	6,05
1.01.0.01.01.0.0 0.0.00.01.01.1.0 1.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.711.200,00	0,00	0,00	0,00	4.711.200,00	1.910.700,00	0,00	0,00	0,00	1.910.700,00	2.800.500,00	59,44
1.01.0.01.01.0.0 0.0.00.01.01.1.0 1.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	4.050.000,00	0,00	0,00	0,00	4.050.000,00	372.000,00	0,00	0,00	0,00	372.000,00	3.678.000,00	90,81
1.01.0.01.01.0.0 0.0.00.01.01.1.0 1.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.360.000,00	0,00	0,00	0,00	3.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360.000,00	100,00
1.01.0.01.01.0.0 0.0.00.01.01.1.0 1.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.050.000,00	0,00	0,00	0,00	3.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050.000,00	100,00
1.01.0.01.01.0.0 0.0.00.01.01.1.0 1.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.374.500,00	0,00	0,00	0,00	2.374.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374.500,00	100,00
1.01.0.01.01.0.0 0.0.00.01.01.1.0 2.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.034.312.691.605,00	0,00	0,00	0,00	1.034.312.691.605,00	971.977.145.676,00	0,00	0,00	0,00	971.977.145.676,00	62.335.545.929,00	6,03
1.01.0.01.01.0.0 0.0.00.01.01.1.0 2.03.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	51.092.700,00	0,00	0,00	0,00	51.092.700,00	48.630.000,00	0,00	0,00	0,00	48.630.000,00	2.462.700,00	4,82

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan					Realisasi					Bertambah/ (Berkurang)	
		Jenis Belanja				Jumlah	Jenis Belanja				Jumlah	(Rp)	%
		BELANJA OPERASI	MODAL	TAK TERDUGA	TRANSFER		BELANJA OPERASI	MODAL	TAK TERDUGA	TRANSFER			
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12-7	14
8.01.8.01.0.00.0. 00.01.05.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Karukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	39.012.540,00	0,00	0,00	0,00	39.012.540,00	8.007.600,00	0,00	0,00	0,00	8.007.600,00	31.004.940,00	79,47
8.01.8.01.0.00.0. 00.01.06.	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	2.342.737.320,00	0,00	0,00	0,00	2.342.737.320,00	1.968.289.360,00	0,00	0,00	0,00	1.968.289.360,00	374.447.960,00	15,98
8.01.8.01.0.00.0. 00.01.06.1.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	2.342.737.320,00	0,00	0,00	0,00	2.342.737.320,00	1.968.289.360,00	0,00	0,00	0,00	1.968.289.360,00	374.447.960,00	15,98
Jumlah		3.596.427.411.635,00	638.064.521.309,00	11.055.939.527,00	650.237.594.350,00	4.895.785.466.821,00	3.185.343.321.503,22	621.342.023.685,50	707.344.000,00	653.517.358.069,00	4.460.910.047.257,72	434.875.419.563	91,12

KUPANG, 31 DESEMBER 2023

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


AYODHIA G.L. KALAKE

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
Plt. KEPALA BIRO HUKUM	

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	SKPD	Jenis Piutang	Saldo Awal Piutang	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir Piutang
1	2	3	4	5	6	7 = 4 + 5 - 6
1	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	10.553.072.128,00	17.560.530.849,00	8.350.583.744,00	19.763.019.233,00
2	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Piutang Retribusi Daerah	491.497.000,00	23.000.000,00	477.241.000,00	37.256.000,00
3	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Provinsi NTT	Piutang Retribusi Daerah		4.675.000,00		4.675.000,00
4	Dinas Kelautan dan Perikanan		104.200.000,00	264.957.825,00	3.850.000,00	365.307.825,00
		Piutang Retribusi Daerah	104.200.000,00	263.339.075,00	3.850.000,00	363.689.075,00
		Piutang Lain-lain PAD yang Sah		1.618.750,00		1.618.750,00
5	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Piutang Retribusi Daerah	476.125.000,00	8.250.000,00	6.750.000,00	477.625.000,00
6	Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Piutang Retribusi Daerah		5.200.000,00	-	5.200.000,00
7	Badan Pendapatan dan Aset Daerah		126.251.189.808,35	955.485.104,00	119.862.082.027,47	7.344.592.884,88
		Piutang Pajak Daerah	1.174.124.266,10	62.368.614,00	61.019.396,00	1.175.473.484,10
		Piutang Retribusi Daerah	1.349.825.000,00	38.000.490,00	37.650.000,00	1.350.175.490,00
		Piutang Lain-lain PAD yang Sah	123.727.240.542,25	855.116.000,00	119.763.412.631,47	4.818.943.910,78
8	Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		2.355.031.495,00	1.179.342.165,00	2.132.031.495,00	1.402.342.165,00
		Piutang Lain-lain PAD yang Sah	1.730.985,00		1.730.985,00	-
		Piutang Lainnya	2.353.300.510,00	1.179.342.165,00	2.130.300.510,00	1.402.342.165,00
	TOTAL		140.231.115.431,35	20.001.440.943,00	130.832.538.266,48	29.400.018.107,88

KUPANG, 31 DESEMBER 2023

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



AYODHIA G. L. KALAKE

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
Plt. KEPALA BIRO HUKUM	

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Jenis Piutang	Jumlah Piutang	Jumlah Penyisihan	Jumlah Piutang Bersih
1	2	3	4	5
1.	Piutang Pajak Daerah	1.175.473.484,10	(1.150.385.384,10)	25.088.100,00
2.	Piutang Retribusi Daerah	2.238.620.565,00	(2.085.342.743,85)	153.277.821,15
3.	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	24.583.581.893,78	(5.939.498.641,46)	18.644.083.252,32
4.	Piutang Lainnya	1.402.342.165,00	(228.896.710,83)	1.173.445.454,17
	TOTAL	29.400.018.107,88	(9.404.123.480,24)	19.995.894.627,64

KUPANG, 31 DESEMBER 2023

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


AYODHIA G. L. KALAKE

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
Pit. KEPALA BIRO HUKUM	

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	SKPD	Jumlah Dana Bergulir	Jumlah Penyisihan Dana Bergulir	Jumlah Piutang Bersih
1	2	3	4	5
N I H I L				
	TOTAL	-	-	-

KUPANG, 31 DESEMBER 2023

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


AYODHIA G. L. KALAKE

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
Plt. KEPALA BIRO HUKUM	

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan / Lembaga / Pihak Ketiga	Dasar hukum penyertaan	Bentuk penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	Jumlah penyertaan modal daerah	Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan awal tahun	Penyertaan modal tahun ini	Jumlah modal yang disertakan sampai dengan akhir tahun ini	Sisa modal yang belum disertakan	Hasil penyertaan modal (investasi) daerah tahun ini	Jumlah modal (investasi) yang telah diterima kembali sampai tahun ini	Jumlah Sisa Modal (Investasi) yang disertakan sampai dengan tahun ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=6-9	11	12	13=9-12
I	Investasi Permanen				1.057.275.813.000,00	697.034.363.000,00	-	697.034.363.000,00	360.241.450.000,00	60.645.290.853,00	-	697.034.363.000,00
	1983 s/d 2022	PT. Bank NTT	Perda	Penyertaan Modal pada Bank NTT	766.249.000.000,00	525.007.550.000,00	-	525.007.550.000,00	241.241.450.000,00	53.979.253.232,00	-	525.007.550.000,00
	1987 s/d 2017	PT. Flobamor	Perda	Penyertaan Modal pada PD. Flobamor	19.426.813.000,00	19.426.813.000,00	-	19.426.813.000,00	-	-	-	19.426.813.000,00
	2009 S/D 2017	PT. Askrida	Perda	Saham	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	-	1.600.000.000,00	-	281.677.216,00	-	1.600.000.000,00
	2012 S/D 2022	PT. Jamkrida	Perda	Saham	175.000.000.000,00	129.000.000.000,00	-	129.000.000.000,00	46.000.000.000,00	6.384.360.405,00	-	129.000.000.000,00
	2021	PT. KI Bolok	Perda	Penyertaan Modal KI Bolok	95.000.000.000,00	22.000.000.000,00	-	22.000.000.000,00	73.000.000.000,00	-	-	22.000.000.000,00
II	Investasi Non Permanen				92.122.185.016,00	92.122.185.016,00	-	92.122.185.016,00	-	375.358.076,70	90.942.842.851,00	1.179.342.165,00
	2003 s/d 2019	PNS Lingkup Pemprov. NTT	Perda APBD	Kredit Kendaraan Roda 2	48.692.760.000,00	48.692.760.000,00	-	48.692.760.000,00	-	-	48.692.760.000,00	-
	2007 s/d 2021	PNS Lingkup Pemprov. NTT	Perda APBD	Kredit Kendaraan Roda 4	43.429.425.016,00	43.429.425.016,00	-	43.429.425.016,00	-	375.358.076,70	42.250.082.851,00	1.179.342.165,00
Total					1.149.397.998.016,00	789.156.548.016,00	-	789.156.548.016,00	360.241.450.000,00	61.020.648.929,70	90.942.842.851,00	698.213.705.165,00

KUPANG, 31 DESEMBER 2023

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



AYODHIA G. L. KALAKE

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
Pit. KEPALA BIRO HUKUM	

LAMPIRAN XII PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 2 TAHUN 2024
TANGGAL : 13 AGUSTUS 2024

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.918.079.965.386,67	413.045.847.740,74	385.578.240.224,32	1.945.547.572.903,09
2	RSUD Prof Dr W Z Johannes Kupang	190.740.816.122,27	65.693.597.255,00	62.995.164.822,81	193.439.248.554,46
3	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	189.200.471.336,02	11.892.968.205,00	37.327.764.866,03	163.765.674.674,99
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	4.541.972.126.436,68	301.401.366.987,15	796.255.679.534,64	4.047.117.813.889,19
5	Satuan Polisi Pamong Praja	1.594.906.602,40	-	658.804.452,42	936.102.149,98
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.513.470.670,90	37.296.000,00	1.053.152.876,46	3.497.613.794,44
7	Dinas Sosial	47.286.951.612,85	685.742.992,00	2.768.079.612,97	45.204.614.991,88
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	374.422.079,72	2.740.594.290,00	708.467.461,20	2.406.548.908,52
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	118.707.137.311,50	12.538.724.301,00	12.854.161.488,83	118.391.700.123,67
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	10.414.092.506,48	-	424.010.708,65	9.990.081.797,83
11	Dinas Perhubungan	106.215.593.543,95	49.334.713.883,00	13.586.343.870,71	141.963.963.556,24
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.197.100.913,75	330.572.999,00	1.151.913.703,00	5.375.760.209,75
13	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	26.125.193.283,85	-	4.885.352.978,28	21.239.840.305,57
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	16.263.897.853,42	48.338.631,00	1.114.351.126,91	15.197.885.357,51
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	259.699.137.543,09	160.604.000,00	3.213.737.620,88	256.646.003.922,21
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	16.481.473.708,32	637.104.790,00	1.248.665.780,44	15.869.912.717,88
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	158.302.643.789,78	46.505.689.160,00	28.020.587.106,10	176.787.745.843,68
18	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	52.726.859.061,74	-	5.558.268.011,63	47.168.591.050,11
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	96.913.788.111,64	18.859.559.744,00	18.184.382.423,77	97.588.965.431,87
20	Dinas Peternakan	71.057.750.770,63	5.891.068.005,00	9.547.917.347,79	67.400.901.427,84

No.	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6=3+4-5
21	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	36.146.905.685,51	-	4.219.020.617,82	31.927.885.067,69
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	29.420.576.243,06	493.000.000,00	989.571.588,49	28.924.004.654,57
23	Sekretariat Daerah	474.987.974.253,50	2.595.797.008,50	65.520.128.631,55	412.063.642.630,45
24	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	58.736.072.555,94	92.823.750,00	4.325.000.349,28	54.503.895.956,66
25	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.523.146.061,82	-	2.878.366.152,11	1.644.779.909,71
26	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	1.321.239.495.144,48	55.255.449.289,46	47.205.165.137,50	1.329.289.779.296,44
27	Badan Keuangan Daerah	2.295.928.881,06	115.361.190,00	1.620.175.861,87	791.114.209,19
28	Badan Kepegawaian Daerah	3.320.525.321,40	324.659.020,00	2.556.403.471,80	1.088.780.869,60
29	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	32.554.023.682,10	477.042.000,00	3.131.286.497,77	29.899.779.184,33
30	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	382.526.647,21	25.974.000,00	160.854.080,30	247.646.566,91
31	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	17.926.505.194,46	662.100.000,00	2.975.770.261,19	15.612.834.933,27
32	Inspektorat Daerah	14.639.066.264,86	15.297.000,00	1.819.922.566,76	12.834.440.698,10
33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	14.574.354.681,20	29.125.000,00	393.408.066,90	14.210.071.614,30
TOTAL		9.843.614.899.262,26	989.890.417.240,85	1.524.930.119.301,19	9.308.575.197.201,92

KUPANG, 31 DESEMBER 2023

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


AYODHIA G. L. KALAKE

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
Pit. KEPALA BIRO HUKUM	

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Uraian	Daftar Aset Tetap Per 31 Desember 2022	Mutasi		Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2023
			Tambah	Kurang	
1	Aset Tetap Tanah	2.946.035.625.118,05	56.266.789.694,46	66.762.100.000,00	2.935.540.314.812,51
2	Aset Tetap Peralatan dan Mesin	1.735.225.417.396,36	276.655.883.913,40	28.403.822.419,08	1.983.477.478.890,68
3	Aset Tetap Gedung dan Bangunan	2.297.838.521.596,67	267.630.302.433,00	104.197.234.011,83	2.461.271.590.017,84
4	Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi	6.509.714.653.635,49	321.089.479.783,44	11.583.151.211,12	6.819.220.982.207,81
5	Aset Tetap Lainnya	222.888.117.017,39	24.555.241.271,00	1.492.260.418,00	245.951.097.870,39
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	221.575.002.029,50	43.692.720.145,55	79.371.856.371,00	185.895.865.804,05
7	Akumulasi Penyusutan	(4.089.662.437.531,20)	(1.251.724.100.966,48)	(18.604.406.096,32)	(5.322.782.132.401,36)
Jumlah		9.843.614.899.262,26	(261.833.683.725,63)	273.206.018.334,71	9.308.575.197.201,92

KUPANG, 31 DESEMBER 2023

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR.


AYODHIA G. L. KALAKE

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
Pit. KEPALA BIRO HUKUM	

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN
PER 31 DESEMBER 2023

No.	SKPD	Saldo Awal	Reklasifikasi								Reklasifikasi/Penghapusan	Saldo Per 31 Desember 2023
			Bertambah				Berkurang					
			Aset Tetap Lainnya	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Peralatan dan Mesin	Aset Tetap Lainnya	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Peralatan dan Mesin		
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	19.891.722.136,10		34.605.863.119,84								54.497.585.255,94
2	RSU Prof. Dr. W.Z. Johannes			1.577.681.825,00								1.577.681.825,00
3	Dinas Kesehatan	2.139.979.428,00										2.139.979.428,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	170.514.458.045,40			7.509.175.200,71				77.310.357.700,00			100.713.275.546,11
5	Badan Penanggulangan Bencana	97.800.000,00										97.800.000,00
6	Dinas Sosial	772.766.000,00										772.766.000,00
7	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.470.287.492,00										3.470.287.492,00
8	Dinas Perhubungan	2.000.000,00										2.000.000,00
9	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.056.374.000,00										1.056.374.000,00
10	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.411.235.000,00										2.411.235.000,00
11	Dinas Kelautan dan Perikanan	301.570.000,00										301.570.000,00
12	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	28.094.000,00										28.094.000,00
13	Dinas Peternakan	2.061.498.671,00						2.061.498.671,00				-
14	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	865.597.060,00										865.597.060,00
15	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1.589.000.000,00										1.589.000.000,00
16	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	908.098.297,00										908.098.297,00
17	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	15.464.521.900,00										15.464.521.900,00
JUMLAH		221.575.002.029,50	-	36.183.544.944,84	7.509.175.200,71	-	-	2.061.498.671,00	77.310.357.700,00	-	-	185.895.865.804,05

KUPANG, 31 DESEMBER 2023

PI. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


AYODHIA G. L. KALAKE

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
Plt. KEPALA BIRO HUKUM	

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 2 TAHUN 2024
TANGGAL : 13 AGUSTUS 2024

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2023

No.	SKPD	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	6= 3+4-5
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5.247.543.470,00	679.802.799,72		5.927.346.269,72
2	RSUD Prof Dr W Z Johannes Kupang	5.446.580.139,00		5.032.654.000,00	413.926.139,00
3	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.372.695.145,20		254.260.000,00	6.118.435.145,20
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	8.264.137.747,55	3.042.067.479,03	2.242.398,00	11.303.962.828,58
5	Satuan Polisi Pamong Praja	-			-
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	55.589.175,00		31.757.400,00	23.831.775,00
7	Dinas Sosial	10.140.000,80			10.140.000,80
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	14.185.000,00		14.185.000,00	-
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	882.268.846,32			882.268.846,32
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	533.464.340,00			533.464.340,00
11	Dinas Perhubungan	1.661.067.516,68		35.049.666,68	1.626.017.850,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	283.858.368,00		151.211.466,00	132.646.902,00
13	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.323.565.200,00		1.284.585.600,00	1.038.979.600,00
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	164.062.241,85	104.000.000,00	154.645.800,00	113.416.441,85
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	37.950.000,00			37.950.000,00
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.126.802.612,00	15.000.000,00	311.798.312,00	830.004.300,00
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.107.924.500,00		59.950.000,00	2.047.974.500,00
18	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	3.710.103.200,00			3.710.103.200,00
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	7.855.305.944,92	200.748.000,00	44.244.480,00	8.011.809.464,92
20	Dinas Peternakan	181.987.923,00	23.340.000,00	4.668.000,00	200.659.923,00
21	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	24.098.938.824,07		29.942.880,00	24.068.995.944,07
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.327.964.000,00			1.327.964.000,00
23	Sekretariat Daerah	916.755.349,00	2.446.213.122,00	70.964.800,12	3.292.003.670,88

No.	SKPD	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	6= 3+4-5
24	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	453.894.636,20		453.894.636,20	-
25	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-			-
26	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	292.650.964.014,14	18.334.171.184,88	166.870.000,00	310.818.265.199,02
27	Badan Keuangan Daerah	8.014.623.819,00	2.375.636.349,00	14.250.000,00	10.376.010.168,00
28	Badan Kepegawaian Daerah	175.186.449,61		158.648.000,00	16.538.449,61
29	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	131.920.000,00		131.920.000,00
30	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	-			-
31	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	3.965.000,00			3.965.000,00
32	Inspektorat Daerah	21.899.000,00		11.899.000,00	10.000.000,00
33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	28.694.000,00		18.800.000,00	9.894.000,00
Jumlah		373.972.116.462,34	27.352.898.934,63	8.306.521.439,00	393.018.493.957,97

KUPANG, 31 DESEMBER 2023

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



AYODHIA G. L. KALAKE

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
Pit. KEPALA BIRO HUKUM	

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH
PER 31 DESEMBER 2023

No.	Tujuan Pembentukan Dana Cadangan	Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan	Jumlah Dana Cadangan Yang Direncanakan	Saldo Awal	Transfer dari Kas Daerah	Transfer ke Kas Daerah	Saldo akhir	Sisa dana yang belum dicadangkan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pemilihan Kepala daerah Tahun 2024	Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 34 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024	486.250.000.000,00	100.000.000.000,00	240.000.000.000,00	136.488.800.000,00	203.511.200.000,00	146.250.000.000,00
Jumlah			486.250.000.000,00	100.000.000.000,00	240.000.000.000,00	136.488.800.000,00	203.511.200.000,00	146.250.000.000,00

KUPANG, 31 DESEMBER 2023

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

AYODHIA G. L. KALAKE

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
Pit. KEPALA BIRO HUKUM	

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
PER 31 DESEMBER 2023

No.	Uraian	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	6
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	201.458.557,00		201.458.557,00
2	Utang Bunga Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	61.069.423.338,00	55.688.549.678,00	61.069.423.338,00	55.688.549.678,00
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	-	159.640.544.216,00		159.640.544.216,00
4	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada LKBB-BUMN-Jangka Menengah	-			-
5	Pendapatan Diterima Dimuka	1.281.125.050,05	2.087.231.834,23	1.277.703.675,05	2.090.653.209,23
6	Utang Belanja	23.531.085.676,72	181.321.236.335,13	23.513.895.955,00	181.338.426.056,85
	- Utang Belanja Pegawai	3.795.334.702,00	1.146.531.396,09	3.795.334.702,00	1.146.531.396,09
	- Utang Belanja Barang dan Jasa	19.264.784.625,72	21.416.136.862,04	19.247.594.904,00	21.433.326.583,76
	- Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	470.966.349,00	319.823.500,00	470.966.349,00	319.823.500,00
	- Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	464.628.650,00		464.628.650,00
	- Utang Belanja Bagi Hasil		157.974.115.927,00		157.974.115.927,00
7	Utang Jangka Pendek Lainnya	200.243.325.051,00	-	200.243.325.051,00	-
	- Hutang Taspen	-			-
	- Hutang Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	200.243.325.051,00		200.243.325.051,00	-
	- Hutang Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	-			-
Jumlah		286.124.959.115,77	398.939.020.620,36	286.104.348.019,05	398.959.631.717,08

KUPANG, 31 DESEMBER 2023

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


AYODHIA G. L. KALAKE

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
Pit. KEPALA BIRO HUKUM	

LAMPIRAN XVIII PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 2 TAHUN 2024
TANGGAL : 13 AGUSTUS 2024

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
PER 31 DESEMBER 2023

No.	Uraian	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	6= 3+4-5
1	Utang Kepada LKBB-BUMN- Jangka Menengah-PT. SMI	980.877.323.256,00	-	184.419.810.422,00	796.457.512.834,00
	Jumlah	980.877.323.256,00	-	184.419.810.422,00	796.457.512.834,00

KUPANG, 31 DESEMBER 2023

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


AYODHIA G. L. KALAKE

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
Plt. KEPALA BIRO HUKUM	

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DAFTAR SUB KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023
DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Nama SKPD	Nama Sub Kegiatan	Jumlah				Jumlah yang masih harus dianggarkan kembali pada APBD Tahun berikutnya	Dasar Hukum
			Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Tambah/Kurang	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
N I H I L								
JUMLAH			-	-	-	-	-	

KUPANG, 31 DESEMBER 2023

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


AYODHIA G. L. KALAKE

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
Plt. KEPALA BIRO HUKUM	

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
IKHITISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

No.	BUMD/Perusahaan Daerah Tahun	Sumber a)	Status b)	Aset Lancar	Aset Tidak Lancar	Aset Lainnya	Total Aset	Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban Jangka Panjang	Total Kewajiban	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	BPYDS c)	Ekuitas Lainnya	Laba Ditahan	Total Ekuitas	% Saham Daerah	Kepemilikan Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5+6+7	9	10	11 = 9+10	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 x 18
I	Bidang Perbankan																	
	PT. Bank NTT	2	S	16.701.072.132.975,00	206.042.770.151	418.328.646.537	17.325.443.549.663	14.777.274.878.871		14.777.274.878.871	2.045.186.350.000	12.714.603.668	53.979.253.232	380.116.356.142	110.151.360.982	2.548.168.670.792	25,51	650.037.827.919
II	Bidang Perdagangan																	
	PT. Flobamor	2	S	7.377.250.510	9.706.162.241	961.552.039	18.044.964.790	10.635.820.601	6.791.344.455	17.427.165.056	25.036.265.943	-	-	-	(24.418.466.209)	617.799.734	99,90	617.181.934
III	Bidang Penjamin Kredit																	
	PT. Jamkrida	2	S	138.521.451.945	105.386.128.498		243.907.580.443	16.739.272.251	70.711.151.404	87.450.423.655	129.250.000.000		6.384.360.405	13.589.724.427	13.617.432.361	156.457.156.788	99,80	156.144.242.474
IV	Bidang Kawasan Perindustrian																	
	KI Bolok	2	S	9.550.236.187	6.025.414.093	179.570.000	15.755.220.280	-	-	-	22.000.000.000	-	-	80.680.002	(6.325.459.722)	15.755.220.280	100,00	15.755.220.280
Total Seluruh Bidang				16.856.521.071.617	327.160.474.983	419.469.768.576	17.603.151.315.176	14.804.649.971.723	77.502.495.859	14.882.152.467.582	2.221.472.615.943	12.714.603.668	60.363.613.637	393.786.760.571	93.024.867.412	2.720.998.847.594	-	822.554.472.608

KUPANG, 31 DESEMBER 2023

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


AYODHIA G. L. KALAKE

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
Plt. KEPALA BIRO HUKUM	

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
IKHITISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA/RUGI) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

No.	BUMD/Perusahaan Daerah Tahun	Sumber a)	Status b)	Pendapatan	Beban	Laba (Rugi) Kotor	Pendapatan di Luar Usaha	Beban di Luar Usaha	Laba (Rugi) Sebelum Pajak
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Bidang Perbankan								
	PT. Bank NTT	2	S	1.166.470.217.723,00	1.017.481.062.666,00	148.989.155.057,00	14.513.405.303,00	14.958.830.811,00	148.543.729.549,00
II	Bidang Perdagangan								
	PT. Flobamor	2	S	17.821.763.892,00	13.818.589.365,00	4.003.174.527,00	20.707.568,00	6.501.802.066,00	(2.477.919.971,00)
III	Bidang Penjamin Kredit								
	PT. Jamkrida	2	S	28.892.745.570,00	13.659.090.834,00	15.233.654.736,00	1.482.490.274,00	249.981.986,00	16.466.163.024,00
IV	Bidang Kawasan Perindustrian								
	KI Bolok	2	S	1.390.072.272,00	3.299.307.161,00	(1.909.234.889,00)	143.241.061,00	16.053.733,00	(1.782.047.561,00)
Total Seluruh Bidang				1.214.574.799.457,00	1.048.258.050.026,00	166.316.749.431,00	16.159.844.206,00	21.726.668.596,00	160.749.925.041,00

KUPANG, 31 DESEMBER 2023

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


AYODHIA G. L. KALAKE

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
Plt. KEPALA BIRO HUKUM	